DINAMIKA KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) TERHADAP STABILITAS POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA: STUDI HISTORIS DARI ORDE BARU HINGGA REFORMASI

Nur Soleh¹, Muhammad Rizki², Alya Sabrina³, Ahmad Maftuh Sujana⁴

^{1,2,3,4}UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: solehnur053@gmail.com¹, rizkimuh0805@gmail.com²,
alyaasabrina123@gmail.com³, maftuhsujana@gmail.com⁴

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dinamika korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia dari era Orde Baru hingga Reformasi. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana praktik KKN yang meluas dan sistemik pada masa Orde Baru berkontribusi pada ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta bagaimana reformasi berupaya mengatasi tantangan tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis perubahan karakteristik KKN dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif dengan pendekatan historis dan analisis data sekunder dari laporan KPK, literatur akademik, serta dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada era Orde Baru, KKN terstruktur dan melibatkan elit politik serta kroni, yang menyebabkan kerusakan sistemik dan ketimpangan ekonomi. Reformasi membawa desentralisasi dan upaya pemberantasan KKN, namun praktik tersebut tetap meluas karena lemahnya struktur pengawasan dan integritas moral pejabat. Kesimpulannya, KKN menjadi faktor utama yang menghambat stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, meskipun reformasi telah mendorong perbaikan tata kelola. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan institusi anti-korupsi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Orde baru, Reformasi.

Abstract: This study examines the dynamics of corruption, collusion, and nepotism (KKN) and their impact on Indonesia's political and economic stability from the New Order era to the Reform era. The main issue addressed is how widespread and systemic KKN practices during the New Order contributed to political and economic instability, and how reform efforts have attempted to tackle these challenges. The objective is to analyze changes in the characteristics of KKN and their implications for governance and economic development in Indonesia. The method used is a qualitative historical review and secondary data analysis from KPK reports, academic literature, and policy documents. The findings indicate that during the New Order, KKN was structured and involved political elites and cronies, causing systemic damage and economic disparity. The Reform era introduced decentralization and anti-KKN measures, but practices persisted due to weak oversight and low official integrity. The conclusion is that KKN remains a major obstacle to Indonesia's political and economic

stability, despite reform-driven governance improvements. The study implies the necessity of strengthening anti-corruption institutions, transparency, and accountability in government to achieve sustainable political stability and economic growth.

Keywords: *Corruption, Collusion, Nepotism, New Order, Reform.*

PENDAHULUAN

Lebih dari dua dekade pasca reformasi Indonesia terus menghadapi masalah mendasar dalam mencapai transformasi politik dan ekonomi yang diharapkan. Ignas Kleden mengemukakan bahwa tidak ada perubahan berarti dalam kondisi politik Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Bahkan, reformasi cenderung stagnasi sebelum akhirnya bisa mencapai tujuannya secara maksimal. Ketidakjelasan arah reformasi menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, yang tak bisa membedakannya antara tokoh reformis sejati dan merugikan yang hanya mengambil momentum reformasi. Hal ini dipasang dengan pemberitaan media massa yang menggambarkan perubahan sebagai fenomena yang kehilangan tujuan dan tanpa konsep yang jelas.

Isu Reformasi banyak sekali dihubungkan dengan latar belakang kekuasaan sentralistik, pengaruh ekonomi global, serta permasalahan-permasalahan seperti hak asasi manusia (HAM), pemerintahan bersih, masyarakat sipil, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi dipandang sebagai cara koreksi sekaligus perlawanan terhadap rezim Orde Baru, khususnya dalam aspek politik dan sosial ekonomi. Namun, tidak semua yang berbicara tentang reformasi bersikap jujur dan terbuka. Terdapat kecenderungan untuk menyembunyikan tujuan dan kepentingan pribadi di balik retorika idealisme. Beberapa individu memanfaatkan bahasa dan komunikasi untuk mencapai kepentingan pribadi. (Basuki, 2012)

Merespon persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana bahasa dan wacana politik yang digunakan dalam arena politik pasca reformasi, tidak hanya untuk penyampaian gagasan melainkan menjadi sarana yang sangat strategis untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan.

Penelitian terdahulu, Dalam penelitian yang ditulis Sri Handayani Retna Wardani tahun 2022 dengan judul Tindak Lanjut Penuntasan Kasus Korupsi Mendiang Presiden Soeharto Dalam Rangka Mewujudkan Cita-cita Reformasi, berbicara mengenai adanya praktek knn yang di mana korupsi, kolusi, dan Nepotisme semuanya ada ketika presiden soeharto

memimpin dan menjadi salah satu penyebab beliau lengser dari jabatannya. Di dalam artikel ini lebih menekankan praktek kkn saat soeharto berkuasa dan bagaimana praktek tersebut ditamatkan pada era reformasi ini. Jika di artikel kami lebih membahas dan menekankan kepada peran dari praktek kkn sendiri dari sisi politik ataupun ekonomi yang sangat mendominasi untuk keterstabilan indonesia.

Dalam jurnal lainnya pula yang diterbitkan oleh Budiman Widodo dan Winarti pada tahun 2022 berjudul Kolusi Pintu Korupsi: Perlu Pendekatan Etika Administrasi Dan Norma Hukum, membahas mengenai kolusi adalah sebuah pintu gerbang dari timbulnya korupsi sebenarnya korupsi atau kolusi itu sangat melanggar hukum tetapi dalam kasus kolusi tidak sampai penyelesaian hukum, dalam artikel ini pun dibahas seperti apa hubungan simbiosis mutualisme antara pejabat itu titik fokus pembahsa dalam artikel ini. Jika Artikel yang kami terbitkan itu pembahasannya lebih condong ke tiga aspek tersebut yaitu (KKN) korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya berdiskusi seputar satu atau dua hal saja karena bertaut satu sama lainnya tetapi juga lebih difokuskan pada dampak dari ketiga pelanggaran hukum ini dengan keseimbangan politik maupun ekonomi Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan pendekatan historis untuk menganalisis dinamika korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia dari masa Orde Baru hingga era reformasi. Dengan menggunakan teori perubahan sosial dan teori institusional, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik KKN berkembang dan bertahan dalam struktur politik dan ekonomi Indonesia, serta bagaimana upaya reformasi memengaruhi atau gagal memengaruhi praktik tersebut.

Fokus penelitian ini adalah pada analisis historis terhadap dinamika KKN dan dampaknya terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia dari masa Orde Baru hingga era reformasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberlanjutan praktik KKN meskipun telah dilakukan reformasi, serta untuk memahami bagaimana praktik tersebut memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi negara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research) sebagai kerangka utama dalam menganalisis pengaruh praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, khususnya pada era Orde Baru hingga masa Reformasi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena historis dan struktural melalui interpretasi kritis terhadap

berbagai literatur ilmiah yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggali pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap konteks sejarah dan dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi berkembangnya praktik KKN di Indonesia. Penelitian ini bersifat eksploratif dalam memetakan pola-pola kekuasaan, resistensi sosial, serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan pembangunan ekonomi nasional.

Desain penelitian ini bersifat historis-analitis. Peneliti menelusuri dan merekonstruksi peristiwa-peristiwa penting berdasarkan telaah literatur akademik untuk mengidentifikasi kontinuitas dan perubahan dalam praktik KKN dari masa ke masa. Dalam proses ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap gagasan, narasi, serta argumentasi ilmiah yang tertuang dalam karya-karya akademik, baik berupa buku maupun artikel jurnal.

Partisipan manusia tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Unit analisis sepenuhnya berupa teks tertulis dari berbagai sumber ilmiah yang telah dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi isinya terhadap topik penelitian. Teknik purposive sampling digunakan untuk memastikan bahwa hanya sumber-sumber yang memiliki signifikansi konseptual dan empiris terhadap studi KKN yang dikaji. Peneliti tidak menggunakan sumber berupa arsip surat kabar, dokumen resmi negara, ataupun laporan media, untuk menjaga fokus analisis tetap pada basis ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengkaji buku-buku ilmiah serta jurnal akademik yang membahas sejarah politik Indonesia, struktur birokrasi Orde Baru, dinamika gerakan reformasi, serta teori-teori tentang korupsi dan kekuasaan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik. Analisis ini mencakup proses reduksi data, penyusunan narasi tematis, serta interpretasi terhadap makna dan implikasi yang terkandung dalam teks. Peneliti juga memperhatikan konteks sosial-politik saat literatur tersebut ditulis untuk menafsirkan kerangka pemikiran dan posisi ideologis para penulisnya.

Proses penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, yaitu sejak Januari hingga Maret 2025. Selama periode tersebut, peneliti melakukan penelusuran sumber pustaka, pengelompokan materi, pembacaan kritis, analisis mendalam, serta penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk narasi ilmiah yang komprehensif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dari era Orde Baru hingga masa Reformasi. Berdasarkan kajian historis dan analisis terhadap literatur akademik serta dokumen kebijakan, ditemukan bahwa struktur dan pola KKN tidak hanya bertahan tetapi juga beradaptasi dengan sistem politik dan ekonomi yang terus berubah.

Pertama, pada era Orde Baru, KKN menjadi instrumen utama dalam konsolidasi kekuasaan. Keterlibatan elit politik dan militer dalam jejaring bisnis dan penguasaan sumber daya ekonomi menunjukkan bahwa KKN tidak sekadar penyimpangan administratif, melainkan telah membentuk suatu sistem patronase yang terlembaga. Praktik-praktik ini memperkuat sentralisasi kekuasaan dan menciptakan ketimpangan ekonomi yang tajam.

Kedua, masa Reformasi membawa angin perubahan melalui pembentukan lembaga anti-korupsi, desentralisasi pemerintahan, dan keterbukaan informasi publik. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi struktural tidak sepenuhnya menghapus praktik KKN. Justru, terjadi pergeseran aktor dan modus operandi, dari sentralisasi menjadi desentralisasi KKN di tingkat daerah. Melemahnya pengawasan, rendahnya integritas birokrasi lokal, serta lemahnya sistem sanksi menyebabkan keberlanjutan praktik korup di berbagai lini.

Ketiga, analisis terhadap dinamika kebijakan ekonomi dan politik menunjukkan bahwa KKN memiliki dampak destruktif terhadap stabilitas nasional. Ketergantungan terhadap lembaga keuangan internasional seperti IMF pasca-1998 memperlihatkan bagaimana tekanan eksternal turut membentuk arah reformasi, namun juga membuka celah kompromi politik yang menurunkan efektivitas kebijakan anti-KKN.

Keempat, gerakan mahasiswa terbukti memainkan peran penting dalam mendorong perubahan politik, khususnya dalam momentum pelengseran Soeharto. Namun, pasca-Reformasi, gerakan tersebut mengalami fragmentasi dan kehilangan daya dorong transformatif akibat kooptasi politik serta lemahnya konsolidasi gerakan sipil.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa praktik KKN bukan sekadar masalah hukum dan moral, tetapi mencerminkan krisis struktural dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, solusi pemberantasan KKN harus bersifat sistemik dan berkelanjutan, mencakup reformasi institusional, penguatan kapasitas lembaga pengawasan, serta internalisasi nilai integritas dalam sistem pendidikan dan politik nasional.

Pembahasan

A. Pengertian Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan konsep yang relevan dalam konteks organisasi, baik itu perusahaan, partai politik, asosiasi olahraga, maupun yang lebih signifikan, negara. Dalam kehidupan masyarakat umum, konsep-konsep tersebut tidak memiliki fungsi yang sama. Tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya dalam masyarakat lebih tepat disebut sebagai pencurian, pencopetan, atau perampokan, bukan korupsi. Demikian pula, pemberian imbalan atas jasa yang telah atau akan diberikan dianggap sebagai hal yang wajar dan bukan sebagai bentuk suap atau graft, meskipun dalam teori hal tersebut dapat dikategorikan sebagai korupsi. Sementara itu, kolusi dan nepotisme sering kali dipandang sebagai praktik sosial yang memiliki nilai positif. Kerja sama antara sesama teman untuk memperoleh keuntungan bersama dianggap sebagai strategi bertahan hidup, terutama bagi pedagang dan pengusaha kecil.

Demikian pula, memberikan peluang kepada anggota keluarga dalam suatu usaha dianggap sebagai bentuk dukungan yang wajar. Namun, ketika ketiga unsur ini bergabung dalam suatu sistem, maka praktik tersebut dapat berkembang menjadi mafia atau kejahatan terorganisasi (organized crime). Permasalahan muncul ketika batas antara ranah masyarakat, yang didasarkan pada nilai-nilai moral, kepatutan, dan norma sosial-budaya, menjadi kabur dengan ranah organisasi, terutama negara, yang diatur oleh hukum dan otoritas resmi. Dalam kondisi ini, KKN mungkin tidak selalu dipermasalahkan meskipun dampaknya dapat meresahkan. Sejarah menunjukkan bahwa “kolusi” antara pejabat daerah dan pemilik perkebunan telah terjadi sejak awal kapitalisme perkebunan, meskipun hal tersebut menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Ketika rakyat melakukan perlawanan, masalah yang muncul bukanlah ketidakadilan dari praktik tersebut, melainkan tekanan eksploitasi yang mereka alami. (Basuki, 2012)

B. Pengaruh Kkn Terhadap Politik Dan Ekonomi Pada Era Soeharto Dan Reformasi

Kekuasaan Orde Baru sering digambarkan sebagai negara birokratik (bureaucratic polity), di mana pengambilan keputusan dikendalikan oleh kelompok elite politik, sementara masyarakat hanya dilibatkan dalam implementasi kebijakan. Rezim ini juga dikategorikan sebagai negara otoritarian korporatis (authoritarian corporatism), negara pejabat, dan negara neopatrimonialisme. Dominasi militer dalam pemerintahan menjadi aspek lain yang diperdebatkan, terutama dalam kaitannya dengan supremasi sipil sebagai indikator utama

demokrasi. Dalam kondisi sulitnya mencapai konsensus mengenai reformasi, serta tekanan ekonomi yang semakin berat, pemerintah akhirnya bergantung pada paket bantuan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). Keputusan ini membuka jalan bagi agenda reformasi struktural yang lebih radikal, yang sebelumnya telah lama dinantikan oleh aktor-aktor pasar bebas.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus melakukan kompromi dalam berbagai aspek, termasuk liberalisasi tata niaga komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, gandum, terigu, dan cengkeh. Evaluasi terhadap kebijakan reformasi ini dikendalikan oleh negara-negara kreditor, mencakup sektor yang sangat luas, mulai dari keuangan dan perbankan hingga energi, pertanian, perdagangan, industri, dan kehutanan. Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto membuka peluang bagi aktor-aktor internasional untuk turut serta dalam proses reformasi politik di Indonesia. "Governance reform" kemudian menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan berbagai lembaga bilateral dan multilateral.

Lembaga keuangan internasional seperti World Bank, Asian Development Bank, IMF, dan UNDP memiliki pengaruh signifikan terhadap negara-negara berkembang. Namun, IMF kerap dikritik karena mengabaikan dampak negatif dari ketimpangan distribusi kekayaan serta kurang memperhatikan kebutuhan sosial dasar. Kebijakan IMF juga dinilai memaksa pejabat di negara berkembang untuk melanggar kontrak sosial, yang pada akhirnya merusak legitimasi pemerintah di banyak negara.

Pada periode 1970 hingga 1990-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 7 persen per tahun. Bahkan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand dikategorikan sebagai High Performing East Asian Economies. Namun, setelah mengalami devaluasi mata uang, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan drastis dan bahkan mencapai angka negatif. Hingga saat ini, perekonomian belum kembali ke tingkat pertumbuhan yang pernah dicapai pada masa pemerintahan Orde Baru.

Reformasi telah memicu kompetisi kepentingan di berbagai sektor. Berbagai pihak berusaha membangun argumen untuk mendukung gagasan bahwa reformasi diperlukan, yang pada dasarnya juga menuntut perubahan dalam struktur kekuasaan. Dalam dinamika tersebut, individu atau kelompok dapat dikategorikan sebagai reformis atau pendukung status quo. Reformasi ini telah melahirkan perdebatan serta kontroversi besar dalam sejarah politik Indonesia, yang mempertanyakan berbagai aspek seperti fakta, nilai, dan kebijakan.

Situasi ini muncul karena setiap individu memiliki keterbatasan dalam menentukan kebenaran atau kesalahan secara mutlak. Realitas yang ada cenderung tidak pernah utuh atau pasti, sehingga menghasilkan berbagai interpretasi yang berbeda. Sebagai sebuah arena politik, kontestasi kepentingan memperlihatkan bagaimana suatu isu berkembang menjadi ruang perdebatan yang mencerminkan beragam perspektif yang saling bersaing. Pertama, terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah serta pemahaman setiap aktor mengenai kontroversi yang terjadi. Kedua, perdebatan mencakup argumen pro dan kontra, yang mencerminkan opini publik. Identifikasi terhadap individu dan kelompok yang terlibat menjadi krusial dalam memahami dinamika perubahan yang terjadi, termasuk dalam membedakan antara mereka yang mendukung reformasi dan pihak yang tetap mempertahankan status quo.

Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi kontroversi merupakan langkah penting dalam memperjelas dan memperdalam motif suatu isu, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan yang diperdebatkan. Analisis terhadap akar penyebab kontroversi ini memungkinkan pemetaan lebih jelas apakah perdebatan yang terjadi berlandaskan pada nilai (value), fakta (fact), atau kebijakan (policy).

Keempat, menelaah karakteristik dan sejarah keyakinan serta kebijakan yang telah diterapkan menjadi aspek krusial dalam memahami dinamika kontestasi yang berlangsung. Hal ini mencakup evaluasi terhadap nilai-nilai serta kebijakan alternatif yang diajukan dalam perdebatan tersebut. Untuk itu, diperlukan analisis terhadap berbagai situasi guna memahami tindakan-tindakan yang diambil oleh para aktor politik. Berbagai konteks yang berbeda memungkinkan munculnya beragam motivasi dan strategi dalam merespons suatu peristiwa.

Sebagai contoh, perilaku politik tokoh-tokoh seperti Harmoko dalam menghadapi tekanan dan tuntutan dapat dianalisis dari waktu ke waktu. Hal serupa juga berlaku bagi tokoh-tokoh lain seperti Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Akbar Tanjung, serta Presiden Soeharto sendiri. Dalam konteks gerakan reformasi, bahasa memiliki peran yang sangat signifikan karena mencerminkan “seni dalam menyampaikan pesan” (the art of delivery). Melalui analisis bahasa, dapat diidentifikasi siapa yang menyampaikan pesan dengan cara yang meyakinkan, siapa yang tetap konsisten dengan retorikanya, dan siapa yang mengalami perubahan dalam penyampaian pandangannya. Pola komunikasi ini mengungkapkan berbagai motif kepentingan yang melatarbelakangi tindakan politik yang berbeda-beda.

Untuk mengungkap aspek tersebut, penelitian ini menelusuri jejak komunikasi sebagai “penanda genetik” (genetic marker), yaitu bentuk-bentuk komunikasi yang tertinggal dalam berbagai wacana politik. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa aktivitas politik tidak dapat dipahami secara komprehensif tanpa menelaah rekam jejak komunikasi yang dihasilkan. Media massa, khususnya pemberitaan dari sumber utama seperti Kompas, menjadi salah satu instrumen utama dalam memahami komunikasi politik dalam sistem demokrasi modern.

Media berfungsi sebagai arena di mana berita-berita yang memiliki nilai politik mencerminkan konflik kepentingan serta menjadi referensi bagi berbagai sudut pandang yang berkembang. Dalam konteks ini, isu muncul sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Definisi suatu isu merupakan hasil dari orientasi utama terhadap perkembangan kejadian yang ada. Selain itu, isu juga sangat bergantung pada tingkat abstraksi prinsip-prinsip yang digunakan, kompleksitas konflik yang muncul, serta kondisi yang berkelanjutan hingga akhirnya membentuk peristiwa bernilai dalam diskursus politik. (Basuki, 2012)

C. Sebelum Dan Sesudah Soeharto: Peran Gerakan Mahasiswa Dalam Proses Pelengseran Soeharto

a. Gerakan-Gerakan Mahasiswa

1. Gerakan Mahasiswa Era 1965

Mahasiswa yang sudah muak menyaksikan korupsi birokrasi, ketimpangan sosial dan ancaman PKI (Partai Komunis Indonesia) turun ke jalan menggelorakan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yaitu:

- Turunkan Harga...!
- Rombak Kabinet Dwikora...!
- Bubarkan PKI...!

Respon rezim Soekarno yang represif menyebabkan gugurnya Pahlawan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat), yaitu Arif Rahman Hakim dari Universitas Indonesia. Hal itu justru semakin menggelorakan perlawanan mahasiswa dan rakyat Indonesia.

Mahasiswa membangun aliansi dalam wadah KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang terdiri dari lembaga-lembaga intra dan ekstra kampus. Pembunuhan para Jenderal dalam G-30S/PKI mendorong mahasiswa berkoalisi dengan TNI Angkatan Darat. Sinergi mahasiswa dengan TNI ini berhasil mendapatkan dukungan masyarakat sehingga rezim Soekarno pun berakhir.

b. Gerakan Mahasiswa Era 1974

Orde Baru yang mulai menyimpang dan hegemoni produk-produk Jepang yang mengancam kemandirian ekonomi Indonesia mendorong mahasiswa bergerak. Dari Juli 1973 sampai Januari 1974 terjadi demonstrasi mahasiswa dan pemuda hampir setiap hari di berbagai kota. Ini semua memuncak dengan demonstrasi di Jakarta ketika kedatangan Perdana Menteri Tanaka dari Jepang. Gerakan mahasiswa mempersoalkan dampak penjajahan dari modal asing dan hutang dan juga menuntut penghapusan jabatan Asisten

Pribadi Presiden. Pada saat demonstrasi mahasiswa memuncak, meledak kerusuhan massa di kawasan Jakarta. Demonstrasi mahasiswa sebenarnya tidak berhubungan dengan mereka, tetapi mereka yang dituduh menyebabkannya. Dengan alasan mengakibatkan kerusuhan dan membuat makar, ratusan mahasiswa dan beberapa intelektual ditangkap. Peristiwa puncak kerusuhan dan demonstrasi mahasiswa terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 yang dikenal sebagai peristiwa MALARI (Lima Belas Januari). Diantara mahasiswa yang diadili adalah Hariman Siregar (Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia), Syahrir dan Aini Chalid (Tokoh Pergerakan Universitas Gadjah Mada).

c. Gerakan Mahasiswa Era 1978

Aksi-aksi menolak Soeharto mulai bermunculan dari mahasiswa dan pelajar. Pemerintah menganggap gerakan mahasiswa sebagai ancaman. Untuk meredam gerakan mahasiswa, pemerintah memberlakukan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan membentuk BKK (Badan Kordinasi Kampus). Dengan keluarnya NKK/BKK, DEMA (Dewan Mahasiswa) dibubarkan, organisasi ekstra kampus dilarang beraktifitas di dalam kampus dan semua aktifitas kemahasiswaan berada di bawah pengawasan BKK (Badan Kordinasi Kampus) yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Kebebasan Mimbar Akademik memang berlaku, namun para aktifis pergerakan mahasiswa lebih terfokus kepada pergerakan secara kelembagaan yang dibubarkan. Mereka menolak NKK/BKK. Dalam jangka panjang, pergerakan mahasiswa kurang eksis secara kelembagaan di dalam kampus dan mendorong para aktifis bergerak di bawah tanah atau membentuk lembaga-lembaga kajian. Setelah keluar NKK/BKK, aksi-aksi yang dilakukan pun berlangsung sporadis dan insidental.

d. Gerakan Mahasiswa Era 1998

Krisis moneter menghantam bangsa Indonesia akibat kedzaliman ekonomi yang dilakukan Orde Baru. Mahasiswa turun ke jalanan menolak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta menuntut Presiden Soeharto mundur. Dunia pun menjadi saksi heroisme demonstran mahasiswa yang memenuhi jalan-jalan di berbagai daerah. Masyarakat yang marah kepada pemerintah dengan serta merta di belakang gerakan mahasiswa. Rezim Orde Baru pun tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa di Indonesia.

Angkatan 1998, adalah nama yang disematkan pada Gerakan Mahasiswa 1998. Tahun 1998 mempunyai arti yang penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, karena menandai babak baru suatu jaman yang disebut "era reformasi". Babak baru tersebut tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian krisis moneter yang telah berlangsung sejak Juli 1997 di Thailand dan menyebar ke beberapa negara lain termasuk Indonesia dan Korea Selatan. Krisis moneter menjadi semakin berkelanjutan karena kesalahan penanganan dan pemulihannya. Dalam pengambilan keputusan, pemerintah cenderung menuruti tekanan yang didektekan oleh IMF (International Monetary Fund, lembaga moneter internasional).

Situasi di dalam negeri, khususnya berkenaan dengan eskalasi politik telah muncul benih tuntutan yang mengarah kepada perubahan kepemimpinan nasional. Pada saat itu pemerintah sebenarnya telah merespon segala tuntutan tersebut dengan membentuk semacam komite reformasi, meskipun sifatnya masih terbatas dan menolak kehadiran tokoh-tokoh tertentu untuk duduk dalam komite itu. Akibat kondisi ekonomi dan moneter yang kian memburuk dan adanya tekanan politik di dalam negeri, dalam jangka waktu sekitar dua bulan setelah dilantik menjadi presiden untuk yang ketujuh kalinya. Jenderal Besar Suharto akhirnya mengundurkan diri dan jabatan Presiden secara konstitusional diserahkan kepada Wakil Presiden BJ Habibie.

e. Gerakan Mahasiswa Era Reformasi

Pergerakan mahasiswa Indonesia tidak pernah mati. Mahasiswa bertekad mengawal proses reformasi yang digulirkan tahun 1998. Mahasiswa senantiasa di garda terdepan dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat seperti kenaikan BBM dan TDL, Privatisasi BUMN, korupsi yang merajalela dan sebagainya.

Mahasiswa bergerak melalui lembaga intra kampus seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan juga melalui lembaga-lembaga ekstra kampus seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan lain-lain.(Indra, 2007)

f. Lengsernya Soeharto

perkembangan yang terjadi setelahnya, menyediakan berbagai indikasi yang baik menyangkut sifat dasar dari berbagai kekuatan yang bersaing, yang sekarang ini terlibat dalam pertarungan politik di Indonesia, Sifat dasar dari berbagai kekuatan ini akan dibatasi lebih lanjut di bawah. Bagaimanapun juga, pada akhirnya kekuatan-kekuatan di seluruh spektrum politik ini mempunyai kepentingan yang tetap dalam mencegah munculnya politik berbasis massa yang pada gilirannya berpotensi menjadi ancaman fundamental bagi tatanan sosial yang ada. Akibatnya, muncul suatu kecenderungan kuat untuk membangun suatu kerangka kelembagaan politik untuk menyingkirkan kelompok-kelompok sosial yang paling dimarjinalkan di bawah kekuasaan Soeharto.(Puyo, 1993)

Bahwa Soeharto pada akhirnya gagal untuk mempertahankan kekuasaannya setelah melewati tiga dekade yang memper-tontonkan kelihaiannya dalam memperdaya para pengkritik dan penentangannya merupakan suatu fenomena yang dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Pertama, adalah ketidakmampuan riil Soeharto untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi, yang dengan segera mendelegitimasi kekuasaan otoriterinya. Bagaimanapun juga, masa kekuasaan Soeharto yang panjang sebagian disebabkan oleh kemampuannya untuk memberikan kekayaan ekonomi secara cukup signifikan bagi lintas kelompok masyarakat Indonesia.

Ketika angka pertumbuhan yang tinggi sudah tidak lagi terjadi, maka hanya terdapat sedikit alasan bagi publik untuk terus menerima kekuasaan otoriterinya. Kedua, adalah ditinggalkannya Soeharto di saat-saat genting oleh sejumlah sekutu dekatnya, seperti menteri-menteri perekonomian dan pemimpin parlemen-yang memperkirakan bahwa nasib politik mereka bergantung pada upaya mereka sendiri untuk secepat mungkin ‘meninggalkan kapal. Ketiga, dan mungkin yang paling dramatis, kejatuhannya terjadi setelah suatu periode protes mahasiswa dan rakyat yang semakin berani, yang dalam konteks krisis ekonomi seperti itu-tidak dapat diredam dengan mudah seperti masa-masa sebelumnya.(Vedi,2005)

Apakah terdorong oleh berbagai perkembangan di Jakarta atau tidak, serangkaian demonstrasi mahasiswa berskala besar kemudian terjadi di berbagai kampus di Jawa, Sumatra,

Bali dan Sulawesi. Meskipun mahasiswa umumnya melancarkan protes terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta menyerukan reformasi total, pemilihan kembali Soeharto dengan suara bulat untuk jabatan kepresidenan jelas merupakan suatu unsur utama yang membakar semangat mereka. Suasana masa itu terungkap dengan cara paling baik melalui sebuah insiden yang terjadi di bulan Maret di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, di mana matung Soeharto dibakar di muka umum dalam sebuah demonstrasi mahasiswa (Aspinall, 1998: 215; Ecip 1998: 43-46).

Aksi mahasiswa jelas disambut dengan dukungan publik yang uas, terutama dalam konteks ketidakpuasan masyarakat yang semakin besar terhadap harga-harga yang melambung sebagai akibat merosotnya nilai rupiah. Hiperinflasi di tengah-tengah pengangguran yang meluas yang disebabkan oleh penutupan sejumlah pabrik, bank, perusahaan konstruksi, dan berbagai jenis perusahaan bisnis lain, telah menciptakan suatu keadaan kondusif bagi munculnya kerusuhan massa, terutama di pusat-pusat kota. Demikianlah, para pekerja, yang pada mulanya pasif karena ketidakpastian status mereka, di awal Mei 1998 mulai terlibat dalam berbagai aksi pemogokan di wilayah-wilayah industri sekitar Jakarta. (Lijan, 2011)

g. Dampak dan Solusi Dari Kebijakan KKN Untuk Masyarakat

KKN dianggap sebagai penyimpangan (deviation) yang perlu ditindaklanjuti hanya jika dampaknya telah melewati batas yang dapat diterima. Selama ranah privat dan ranah publik masih beririsan, KKN tidak dipandang sebagai masalah besar. Namun, ketika kedua ranah tersebut mulai dipisahkan secara tegas, KKN pun menjadi isu yang serius. Secara historis, KKN merupakan konsep yang relatif baru. Ia muncul dalam konteks negara modern yang telah mengalami rasionalisasi dalam sistem pemerintahan. Kejelasan konsep KKN semakin terlihat seiring dengan berkembangnya teori negara modern yang menekankan prinsip pemisahan kekuasaan. Konsep ini berkaitan erat dengan kapitalisme, yang menuntut rasionalitas, kepastian hukum, aturan yang jelas, serta profesionalisme.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perlawanan terhadap kapitalisme terkadang melahirkan eksekusi yang bersifat anti-rasional, seperti kecenderungan untuk merelatifkan kepastian hukum serta lebih mengutamakan kesetiaan ideologis dibandingkan kompetensi profesional. Misalnya, di era Revolusi Kebudayaan di Tiongkok pada tahun 1960-an, slogan “better red than expert” (lebih baik setia pada ideologi daripada menjadi ahli) menjadi prinsip utama pemerintahan Mao Zedong. Sementara itu, pada masa Orde Baru di Indonesia, kesetiaan

terhadap ideologi Pancasila menjadi prioritas utama dalam berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintahan.

Meskipun pemahaman ini tidak sepenuhnya tepat, secara empiris hal tersebut dapat diterima karena belum ada istilah yang lebih sesuai untuk menggambarkan persekongkolan antara pengusaha dan penguasa. Kolusi merupakan fenomena yang sangat menonjol selama masa Orde Baru dan menjadi ciri khas sistem ekonomi dan politik di Indonesia, yang berakar pada kekuasaan serta pengaruh karismatis mantan Presiden Soeharto. Praktik kolusi ini memungkinkan terbentuknya konglomerasi, di mana melalui mekanisme tersebut, suatu keluarga dapat mendirikan ratusan perusahaan, seperti yang terjadi pada Liem Sioe Liong. Selain itu, banyak pejabat negara, termasuk menteri, gubernur, wali kota, dan bupati, memiliki jaringan bisnis keluarga yang luas. Dalam sistem ini, perusahaan besar yang memiliki dukungan kekuasaan cenderung semakin berkembang, sementara usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam bersaing dan bertumbuh.

Kolusi dan nepotisme muncul sebagai fenomena baru pada akhir masa Orde Baru dan menjadi bentuk lain dari korupsi yang mulai dikenali oleh masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan praktik kolusi semakin tampak di era tersebut. Pertama, pemerintah memiliki peran yang sangat dominan dalam pembangunan ekonomi serta dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Kedua, munculnya korporasi dan konglomerasi dengan skala yang sangat besar dan perkembangan yang pesat. Ketiga, hanya segelintir individu yang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha berskala besar. Keempat, adanya hubungan erat antara pengusaha tertentu dengan pihak penguasa, yang memberikan keuntungan dalam dunia usaha. Kelima, politik mulai berperan sebagai sumber daya baru atau faktor produksi yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan.

Fenomena ini lebih tampak dibandingkan bentuk persekongkolan lain, seperti kesepakatan antara pengusaha dalam menentukan harga tinggi atau mengatur pembagian wilayah pasar. Sementara itu, isu nepotisme semakin mencuat pada masa akhir Orde Baru, terutama karena keterlibatan keluarga Presiden Soeharto yang dianggap memiliki kekuasaan yang sulit disentuh oleh kritik. Ketika berbagai suara kritis mulai bermunculan, pers semakin berani mengungkap berbagai kasus, sehingga siapa pun dapat menjadi sasaran kritik, kecuali Presiden dan keluarganya.

Misalnya, dalam Kabinet Pembangunan VI, Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief mendapat kritik tajam terkait kasus korupsi dalam pengelolaan Jamsostek. Namun, pada saat

itu, bisnis yang melibatkan keluarga Presiden Soeharto, yang dikenal sebagai “keluarga Cendana,” masih jarang disentuh oleh kritik terbuka. Isu nepotisme awalnya berkembang secara samar, misalnya terkait pengangkatan anggota MPR yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat atau anggota MPR terpilih. Namun, kritik terhadap praktik nepotisme mulai disampaikan secara lebih terbuka ketika Kabinet Pembangunan VII terbentuk. (Adnan, 1999)

Solusi untuk masyarakat mengenai kebijakan KKN sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Hukum dan Peradilan

Salah satu solusi utama untuk mengatasi KKN adalah dengan memperkuat sistem hukum dan peradilan yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas, tanpa pandang bulu, adalah langkah pertama untuk menanggulangi tindakan KKN. Proses hukum yang transparan dan akuntabel akan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Contoh Solusi: Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia yang berperan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi di semua sektor. KPK juga memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai bahaya KKN dan pentingnya integritas. (Muhammad, 2016)

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah dan institusi publik perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran negara. Ini dapat dilakukan melalui penerapan e-government, sistem pelaporan yang lebih terbuka, dan penerapan teknologi informasi untuk memantau pengelolaan anggaran.

Contoh Solusi: Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk memastikan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transparan dan terbuka. Selain itu, pelaporan keuangan yang terbuka di berbagai tingkat pemerintahan juga dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan. (Anderson, 2017)

3. Pendidikan dan Penyuluhan kepada Masyarakat

Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan anti-KKN perlu dimulai dari tingkat dasar hingga tinggi. Masyarakat yang sadar akan bahaya KKN akan lebih cenderung untuk menolaknya, dan pada gilirannya dapat berperan aktif dalam memantau kinerja pemerintah.

Contoh Solusi: - Penyuluhan yang dilakukan oleh KPK kepada masyarakat melalui berbagai media tentang pentingnya berperan serta dalam pencegahan korupsi, serta

sosialisasi tentang hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang bebas dari KKN. Penguatan mata pelajaran terkait etika dan kewarganegaraan di sekolah, untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas.(Gunawan, 2018)

4. Reformasi Sistem Politik

Reformasi politik yang mencakup perubahan dalam sistem pemilihan umum, partai politik, dan pembatasan jabatan publik dapat mengurangi ruang gerak untuk praktik KKN. Salah satu solusi adalah penguatan peran Lembaga Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berfungsi memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan bebas dari praktik manipulasi atau suap.

Contoh Solusi: Perbaiki dalam sistem rekrutmen dan seleksi pejabat publik agar lebih transparan dan berbasis pada kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan politik atau nepotisme.(Haryanto, 2015)

h. Kondisi Indonesia Sebelum dan Sesudah Soeharto Memimpin

1. Kondisi Indonesia Sebelum Soeharto Memimpin

Sebelum Soeharto memimpin Indonesia, negara ini mengalami berbagai tantangan, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial. Indonesia setelah merdeka pada tahun 1945 masih dalam kondisi yang sangat rapuh. Beberapa periode yang mencirikan Indonesia sebelum Soeharto adalah sebagai berikut:

a. Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi:

Indonesia baru saja meraih kemerdekaan pada tahun 1945, namun proses untuk membangun pemerintahan yang stabil sangat berat. Pemerintahan pertama yang dipimpin oleh Presiden Sukarno mengalami kesulitan dalam menjaga kestabilan politik, dengan berbagai pemberontakan di daerah-daerah dan ketegangan dengan Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia. Di sisi ekonomi, negara ini terperosok dalam kemiskinan dan inflasi yang sangat tinggi.(Harry, 2001)

b. Demokrasi Terpimpin dan Depresiasi Ekonomi:

Setelah beberapa dekade ketidakstabilan, Sukarno mengumumkan kebijakan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1957, yang memberikan presiden kekuasaan yang sangat besar, namun ini tidak membawa perbaikan signifikan dalam perekonomian. Dalam kondisi yang semakin buruk, Indonesia mengalami inflasi yang tinggi, kekurangan bahan pangan, dan ketergantungan pada bantuan luar negeri.(Michael, 2009)

c. **Krisis Sosial dan Politik:**

Pada tahun 1965, Indonesia berada pada puncak krisis sosial dan politik, yang ditandai dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang melibatkan pembunuhan enam jenderal dan upaya penggulingan pemerintah. Setelah peristiwa tersebut, negara memasuki masa yang dikenal dengan Orde Lama yang penuh dengan ketegangan politik dan pertarungan kekuasaan antara militer dan partai politik. (Herbert, 1962)

2. **Kondisi Indonesia Sesudah Soeharto Memimpin**

Soeharto mulai memimpin Indonesia setelah menggulingkan Sukarno pada tahun 1967, yang dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Setelah mengambil alih kekuasaan, Soeharto membawa sejumlah perubahan signifikan di berbagai bidang.

a. **Perubahan dalam Sistem Pemerintahan:**

Setelah mengambil alih kekuasaan, Soeharto mendirikan Orde Baru pada tahun 1967, yang menekankan pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih terencana. Pemerintahan Orde Baru cenderung otoriter, dengan menekan kebebasan politik dan mengonsolidasikan kekuasaan melalui militer serta membatasi oposisi. (Richard, 1995)

b. **Pembangunan Ekonomi yang Pesat:**

Soeharto berhasil membawa Indonesia pada periode pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan pesat, terutama pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Program pembangunan ekonomi dengan fokus pada industri dan infrastruktur membuahkan hasil, meskipun dengan catatan adanya ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada utang luar negeri. (Hill, 1996)

c. **Otoritarianisme dan Penyalahgunaan Kekuasaan:**

Meskipun ekonomi tumbuh, pemerintahan Soeharto sangat otoriter. Kebebasan pers dibatasi, partai politik dibungkam, dan korupsi serta Nepotisme Merajalela dalam administrasi pemerintahan. Kekuasaan Soeharto semakin kokoh dengan mengontrol media dan institusi negara, serta menjalin hubungan dekat dengan keluarga dan kroni-kroninya dalam dunia bisnis. (Damien, 2003)

d. **Krisis Ekonomi 1997-1998 dan Kejatuhan Soeharto:**

Pada akhir 1990-an, Indonesia menghadapi krisis ekonomi Asia yang sangat serius, yang memicu inflasi tinggi, peningkatan pengangguran, dan kerusuhan sosial. Krisis ini menyebabkan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, setelah lebih dari 30 tahun berkuasa.

Proses reformasi dimulai setelah kejatuhan Soeharto, dengan upaya untuk memperkenalkan demokratisasi, memperkuat hak asasi manusia, dan reformasi ekonomi. (Ross, 2002)

i. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang harus ditemukan agar dapat dimengerti dalam menghindari kesalahartian hasilnya. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan sumber bacaan saja tanpa melibatkan wawancara langsung atau pengamatan terhadap tokoh-tokoh penting dalam sejarah reformasi. Sehingga, informasi yang diperoleh masih terbatas dan kurang mendalam. Kedua, analisis lebih banyak berorientasi pada kondisi di tingkat nasional, sehingga belum menggambarkan dengan jelas bagaimana praktek KKN terjadi di daerah-daerah yang memiliki situasi sosial dan politik yang berbeda-beda. Ketiga, penelitian ini belum menyajikan data dalam bentuk grafik atau tabel, sehingga pembaca perlu usaha lebih untuk memahami seberapa besar pengaruh KKN terhadap kondisi politik dan ekonomi. Kami menggunakan penelitian historis keterbatasannya lebih kepada akses sumber data sejarah yang kurang mendalam, bisa terjadi karena yang diakses hanya setengahnya dan juga bisa terjadi kesalahan dalam mengakses sumbernya. Karena itu, hasil penelitian ini sebaiknya dianggap sebagai langkah awal yang masih bisa dikembangkan lagi melalui penelitian langsung dan pendekatan dari berbagai bidang ilmu.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia merupakan fenomena struktural yang telah berlangsung lama, dengan akar historis yang dalam sejak masa Orde Baru. KKN bukan hanya bentuk penyimpangan individu, melainkan bagian dari sistem kekuasaan yang terinstitusionalisasi melalui relasi antara elit politik, militer, dan dunia usaha. Pada era Orde Baru, KKN menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas kekuasaan, namun sekaligus menciptakan ketimpangan ekonomi dan menggerus kepercayaan publik terhadap negara.

Reformasi 1998 memberikan peluang bagi perbaikan tata kelola melalui desentralisasi dan pembentukan lembaga anti-korupsi. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa praktik KKN tidak serta-merta terhapus. Justru terjadi pergeseran modus operandi dengan munculnya aktor-aktor baru di tingkat lokal yang mereproduksi budaya koruptif dalam kerangka desentralisasi kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan institusional belum

disertai dengan transformasi budaya politik dan integritas birokrasi secara menyeluruh.

Gerakan mahasiswa terbukti memiliki kontribusi historis yang signifikan dalam mendesak perubahan politik, khususnya dalam pelengseran rezim otoriter. Namun, pasca-Reformasi, peran tersebut mengalami tantangan serius berupa fragmentasi, kooptasi politik, dan penurunan daya kritis.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa KKN merupakan salah satu hambatan utama dalam mewujudkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Upaya pemberantasan KKN harus diarahkan pada penguatan lembaga pengawasan, revitalisasi etika birokrasi, serta pembangunan budaya politik yang partisipatif dan berintegritas. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan historis dalam memahami akar persoalan KKN agar solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu menysasar akar sistemik permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. (2017). Transparansi pemerintahan dan akuntabilitas: Pembelajaran dari negara-negara berkembang. *Journal of Public Policy*, 45.
- Benda, H. J. (2001). *The Indonesian revolution and the political economy of the early republic*. New York: Oxford University Press.
- Feith, H. (1962). *The Indonesian revolution and the collapse of the old order*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gunawan. (2018). Pendidikan antikorupsi sebagai solusi untuk mengurangi KKN di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 212.
- Hadiz, V. R. (2005). *Dinamika kekuasaan ekonomi politik Indonesia pasca Soeharto*. Depok: LP3ES.
- Haryanto, A. (2015). Reformasi politik dan pengurangan praktik KKN di Indonesia. *Political Science Review*, 90.
- Hill, H. (1996). *The Indonesian economy: A resource-based approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hitchcock, M. (2009). *Indonesian: Political economy and society*. Jakarta: Gramedia.
- Jayanti, L. D., dkk. (2024). Manajemen konflik dalam nepotisme pengangkatan jabatan. *Journal Publicuho*, 7(3), 1158–1160.
- Kingsbury, D. (2003). *The politics of Indonesia*. New York: Oxford University Press.
- Kusumah, I. (2007). *Risalah pergerakan mahasiswa*. Bandung: Indyc Press.

- McLeod, R. (2002). *Indonesia's economic crisis: Causes and consequences*. Jakarta: University of Indonesia Press.
- Nasution, A. B., et al. (1999). *Menyingkap korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Robison, R. (1995). *Indonesia: The rise of capital*. Sydney: University of Sydney Press.
- Santoso, P. B. (1993). *Birokrasi pemerintahan Orde Baru: Perspektif kultural dan struktural*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sinambela, L. P. (2011). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudirman, M. (2016). Penguatan sistem hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 120.
- Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan jatuhnya Soeharto*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Wardani, S. H. R., dkk. (2022). Tindak lanjut penuntasan kasus korupsi mendiang Presiden Soeharto dalam rangka mewujudkan cita-cita reformasi. *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 106–107.
- Widodo, B., & Winarti. (2022). Kolusi pintu korupsi: Perlu pendekatan etika administrasi dan norma hukum. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 10(2), 473–475